

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerataan perkembangan pembangunan sebagai upaya merealisasikan tujuan pembukaan UUD 1945 dalam konteks pembangunan nasional. Indikator suksesnya pembangunan didasari model perkembangan pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kesenjangan sosial akibat pengembangan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi. Daerah Provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa (UUD RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar kota dan desa sehingga mencapai keseimbangan melalui investasi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal dan infrastruktur. Secara garis besar, terdapat tiga konsep utama pengembangan wilayah, yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional (*functional integration*) dan pendekatan desentralisasi (Gunena, et, al, 2016).

Pusat pelayanan yaitu daerah yang memiliki jumlah fasilitas dan digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan ketersediaan sarana penunjang kehidupan manusia juga semakin meningkat seperti fasilitas sosial, pemerintahan, dan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya waktu dan jumlah penduduk yang semakin padat maka fasilitas umum sangatlah dibutuhkan seperti fasilitas pendidikan yaitu sekolah; Fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit, Fasilitas perniagaan yaitu pasar, serta fasilitas peribadatan yaitu masjid dan gereja. Dimana fasilitas umum tersebut nantinya akan berfungsi untuk masyarakat, serta dapat digunakan untuk menunjang perekonomian pada suatu wilayah, sehingga nantinya sarana dan prasarananya akan semakin lengkap dalam

kurun waktu beberapa tahun kemudian. Supaya terjadi pemerataan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan pada seluruh wilayah dilakukan pembagian pusat-pusat pelayanan dalam kota. Sebaran pusat pelayanan hierarki sesuai dengan kelengkapan fasilitas dan skala pelayanan.

Hierarki wilayah merupakan jenjang tingkatan yang dapat menunjukkan pusat-pusat kegiatan dalam suatu wilayah. Hirarki pada suatu wilayah menjadi perhatian seiring dengan perlunya penanganan yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan lain yang mempunyai perbedaan kebutuhan penduduknya. Dalam rencana tata ruang, sistem hirarki wilayah juga berguna untuk menggambarkan struktur ruang wilayah. Dalam penentuan hirarki wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan fasilitas pelayanan menjadi penentu hirarki wilayah. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin besar fasilitas pelayanan yang dibutuhkan. Sehingga hirarki wilayah semakin tinggi (Buchori Imam, 2015).

Wilayah itu sendiri dapat merupakan suatu kawasan dalam lingkup yang kecil seperti Kawasan permukiman, kota dan bahkan lebih luas lagi. Sistem hirarki pada suatu wilayah menggambarkan jenjang fungsi wilayah sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut (Robinson Tarigan, 2012). Penentuan pusat-pusat kegiatan yang terkoneksi dengan wilayah yang ada di sekitarnya didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan tersebut. Dengan demikian peran sarana dan prasarana pada suatu wilayah sangat menentukan hirarki pusat-pusat kegiatan pada suatu wilayah.

Pemerataan pusat-pusat pelayanan publik di Indonesia masih banyak permasalahan yang harus dibenahi yang salah satunya berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada wilayah karesidenan Surakarta, yaitu Kabupaten Boyolali termasuk kabupaten yang pembangunan fasilitas pelayanan publik belum merata. Hal inilah yang menjadikan penulis melakukan penelitian di daerah kajian Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali sendiri merupakan kabupaten yang letaknya cukup strategis karena menjadi jalur penghubung antara Kota Semarang dan Kota Surakarta. Namun, permasalahannya adalah fasilitas pelayanan yang belum merata dan aksesibilitasnya di beberapa wilayah Kabupaten Boyolali yang

sulit dijangkau. Bentuk Kabupaten Boyolali yang memanjang juga dapat mempengaruhi tingkat konektivitas wilayahnya. Perbedaan wilayah di Kabupaten Boyolali yang beragam dari yang letaknya berada dekat dengan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu maupun yang wilayahnya di daerah dekat wilayah perkotaan turut mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di wilayah Kabupaten Boyolali

1.2 Perumusan Masalah

- 1) Bagaimana tingkat hierarki wilayah di Kabupaten Boyolali pada tahun 2012-2022?
- 2) Bagaimana konektivitas antar wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2012 - 2022?
- 3) Bagaimana struktur pusat pelayanan di Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Menganalisis tingkat hierarki wilayah di Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2022
- 2) Menganalisis konektivitas antar wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2012 – 2022
- 3) Menganalisis struktur pusat pelayanan di Kabupaten Boyolali.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Menambah wawasan bagi para pembaca mengenai tingkat hirarki pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Boyolali dari tahun 2012-2022 dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan hasil penelitian.
- 2) Masyarakat
Memberikan informasi detail mengenai tingkat konektivitas antar wilayah serta gambaran mengenai struktur pusat pelayanan di Kabupaten Boyolali.

3) Dinas terkait

Memberikan informasi mengenai kondisi pembangunan fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Boyolali selama 10 tahun terakhir serta diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan fasilitas yang ada di suatu wilayah, dan dapat digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan di suatu wilayah.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Telaah Pustaka

A. Geografi Sosial

Geografi Sosial merupakan studi wilayah yang berkenaan dengan aktivitas manusia secara sosial ekonomi dalam suatu ruang, misalnya pertanian, perkebunan, industri, kehutanan, perdagangan, perhubungan, interaksi, dan lain-lain yang berkaitan dengan usaha manusia sebagai makhluk sosial. Tentu saja pandangan geografi akan berbeda dengan pandangan dari ilmu sosial sendiri. Ilmu sosial berbicara tentang masalah-masalah sosial serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan geografi akan berbicara tentang wilayah tempat manusia melakukan aktivitas sosial yang dilakukan, berkaitan dengan faktor fisik dan sosial yang ada di dalamnya.

Geografi Sosial mempunyai objek studi aktivitas manusia sebagai bagian geosfer meliputi perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dengan lingkungannya yakni lingkungan alam dan lingkungan sosial (Hasil Seminar Lokakarya Geografi di Semarang, 1988). Geografi sebagai ilmu spesifik tentang geosfer tentu saja kajian geografi sosial lebih menekankan kegiatan manusia sebagai aspek pokoknya tidak dapat dilepaskan dari aspek lingkungan alam. Konsep tersebut sesuai dengan geografi yang menekankan "*antropocentris*" (Hastuti,2010).

B. Kesenjangan Wilayah

Kesenjangan antar daerah/wilayah ialah kesenjangan yang diakibatkan bukan hanya dari distribusi pendapatan, namun juga adanya ketimpangan pembangunan terhadap wilayah pada suatu negara. Kesenjangan menjurus pada kualitas hidup rata-rata pada semua penduduk, dikarenakan kesenjangan antar daerah adalah perbedaan dari faktor pemberian awal. Kondisi ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik, keadaan sebuah lokasi serta adanya hal yang terjadi pada dua entitas atau lebih di suatu struktur daerah. Oleh karena itu, seharusnya kesenjangan perlu dikaji dengan banyak aspek seperti halnya aspek sosial, keadaan lokasi, politik dan manajemen, kelembagaan, lingkungan, fasilitas umum, dan sebagainya. (Schwarz et al., 2014)

Ketimpangan atau kesenjangan dari berbagai wilayah ialah konsekuensi yang logis terhadap pembangunan dan salah satu tahapan yang terjadi dalam sebuah pembangunan yang dilakukan. Ini pada dasarnya terjadi dikarenakan munculnya perbedaan mengenai sumber daya alam yang dikandung dan kondisi geografis yang ada pada setiap daerah. Hal tersebut mengakibatkan setiap daerah mempunyai potensi wilayah yang berbeda-beda untuk meningkatkan kegiatan pembangunan sehingga terbentuknya “daerah maju” (*developed region*) dan “daerah tertinggal” (*underdeveloped region*).

C. Hierarki Wilayah

Kata hierarki (*hierarchy*) pada dasarnya merupakan organisasi dengan susunan secara bertingkat. Terdapat dua macam hierarki yaitu hierarki fungsional dan hierarki tata ruang. Hierarki fungsional terbentuk akibat pengelompokkan kegiatan sosial dan ekonomi tertentu pada tempat tertentu yang berfungsi sebagai pusat pelayanan. Sedangkan hierarki tata ruang mengacu kepada sistem tata ruang wilayah. Hierarki perkotaan yaitu tempat-tempat konsentrasi yang umumnya berupa daerah perkotaan tersebar di suatu wilayah/negara dengan penduduk (besarnya kota) yang

tidak sama. Sistem hierarki pada suatu wilayah menggambarkan jenjang fungsi wilayah sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut. Penentuan pusat-pusat kegiatan yang terkoneksi dengan wilayah yang ada di sekitarnya didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan tersebut. Dengan demikian peran sarana dan prasarana pada suatu wilayah sangat menentukan hierarki pusat-pusat kegiatan pada suatu wilayah. (Kasikoen, n.d.)

Hierarki wilayah yang menggambarkan struktur ruang dalam penataan ruang, dilihat pada berbagai kota yang ada. Namun hierarki wilayah dapat juga ditentukan berdasarkan kawasan perkotaan yang secara administrasi bukan merupakan kota, namun kondisi fisik, sosial dan ekonominya sudah mencerminkan sifat kekotaannya. Menjadi perhatian adalah sampai seberapa jauh suatu wilayah memberikan kontribusi perkotaan di wilayahnya, atau secara administrasi berupa kelurahan atau desa yang secara berkelompok membentuk kawasan perkotaan di wilayah tersebut. Sehingga perlakuannya dapat dibedakan pada wilayah lain yang masih berupa kawasan perdesaan.

D. Pusat Pelayanan Publik

Pusat pelayanan merupakan titik-titik pertumbuhan yang terjadi di beberapa tempat tertentu saja karena adanya kekuatan penggerak pembangunan, dimana kekuatan tersebut dapat merangsang kegiatan-kegiatan lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengelompok membentuk suatu kesatuan yang pada akhirnya menjadi pusat dari kegiatan atau disebut sebagai pusat pelayanan. Jadi pusat-pusat pelayanan merupakan suatu aglomerasi dari berbagai kegiatan atau aktivitas serta aglomerasi dari berbagai prasarana dan sarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Pusat Pelayanan atau pusat wilayah dimaksudkan sebagai bagian dari kehidupan yang mempunyai fungsi pelayanan, yang

berarti jasa dari pusat pelayanan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pusat pelayanan merupakan tempat yang berguna sebagai basis aktivitas penduduk dalam memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, fasilitas- fasilitas pelayanan yang dibutuhkan terkonsentrasi di tempat tersebut (Muliana et al., 2018).

Perkembangan tiap jenis pusat pelayanan sangat bergantung pada jumlah penduduk yang melayani dan dilayani. Peningkatan jumlah penduduk biasanya disertai dengan peningkatan kemampuan untuk melayani sehingga menimbulkan adanya tingkatan-tingkatan diantara permukiman dari wilayah yang bersangkutan (*hierarchy of towns*) (Muliana et al., 2018).

E. Tata Ruang Wilayah

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan wilayah. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu hukum yang berwujud struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan.

Analisis struktur tata ruang bertujuan untuk menemukan permasalahan pengembangan wilayah yang memiliki dimensi ruang (*space*). Analisis diarahkan sedemikian rupa sehingga mampu memberi gambaran secara menyeluruh tentang keadaan (termasuk jenjang peringkat/hierarki) pusat-pusat pelayanan yang ada pada Kawasan terencana, jangkauan pelayanannya, serta hubungan/ interaksi antar pusat pelayanan tersebut (Muta'ali, 1999).

F. Konektivitas Wilayah

Pengembangan wilayah baik perkotaan maupun wilayah pedesaan memerlukan akses yaitu kemudahan atau keterjangkauan tersebut oleh wilayah lain atau keterjangkauan wilayah tersebut terhadap wilayah sekitarnya. Penguatan konektivitas wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (Muta'ali, 1999). Terdapat tiga prinsip konsepkonektivitas antara lain: pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukankeseragaman (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda (*supply chain system*) yang menghubungkan *hinterland* dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan. Berdasarkan pengertian diatas, maka dalam agenda pembangunan saat ini, konektivitas dapat diartikan sebagai keberadaan aksesibilitas yang mampu mempermudah jangkauan antar wilayah yang berarti akses terhadap beranekaragam informasi yang tersedia dalam skala global yang mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah.

G. Struktur Pusat Pelayanan

Struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota, yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional bahkan internasional. Rencana struktur ruang kota mencakup: rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan kota, dan rencana sistem prasarana kota.

Rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan kota menggambarkan lokasi pusat-pusat pelayanan kegiatan kota, hierarkinya,

cakupan/skala layanannya, serta dominasi fungsi kegiatan yang diarahkan pada pusat pelayanan kegiatan tersebut. Sedangkan rencana sistem prasarana kota mencakup sistem prasarana yang mengintegrasikan kota dalam lingkup yang lebih luas maupun mengintegrasikan bagian wilayah kota serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah kota, sehingga kota dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tujuan penataan ruang kota yang ditetapkan.

unsur pembentuk struktur tata ruang kota terdiri dari pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan jaringan jalan. Kota atau kawasan perkotaan pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem spasial, yang secara internal mempunyai unsur-unsur yang menjadi pembentuknya serta keterkaitannya satu sama lain (Filipus et al, 2019).

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang mengkaji analisis tingkat hirarki wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2012-2022 ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik perbedaan dari segi judul, metode maupun data penelitian. Penelitian tersebut antara lain:

Penelitian yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Pusat Fasilitas Pelayanan Wilayah di Kabupaten Klaten Tahun 2005-2015” (Nadia Maulida Fatmawati, 2018). Penelitiannya yang berjudul “Kajian Pusat-pusat Pelayanan di Kabupaten Kampar” (Rona Muliana, Puji Astuti, Akmal Fadli, 2018). Penelitiannya yang berjudul “Hierarki pusat pelayanan di Kecamatan Ungaran barat dan Ungaran timur” (Puji Hartati, 2016). Ketiga penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan terletak pada tujuan, metode, dan lokasi penelitian. Dari segi tujuan penelitian (Nadia Maulida Fatmawati, 2018) bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan pusat pelayanan fasilitas umum di Kabupaten Klaten tahun 2005-2015. Sedangkan penelitian (Rona Muliana, Puji Astuti, Akmal Fadli, 2018) bertujuan untuk mengidentifikasi struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar berdasarkan RTRW Kabupaten Kampar.

Penelitian ketiga yaitu (Puji Hartati, 2016) bertujuan untuk mengidentifikasi hierarki pusat pelayanan di 2 kecamatan.

Ketiga penelitian tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan penulis, dimana penulis memiliki tujuan untuk penelitiannya yaitu Mengidentifikasi hirarki pusat pelayanan publik wilayah di Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2022, Menganalisis konektivitas antar wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2012 - 2022 serta Menganalisis struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Boyolali berdasarkan analisis skalogram. Jadi, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan lebih kompleks dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah ketiga penelitian tersebut menggunakan metode yang sama yaitu metode analisis skalogram dan metode analisis gravitasi.

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

PENULIS	JUDUL	PERMASALAHAN	TUJUAN	METODE	HASIL
Andrey Roland Gunena, Sonny Tilaar, dan Esli Takumansang (2016)	Hierarki Wilayah Kota Manado	Pembangunan prasarananya baik sosial, ekonomi, dan pemerintahannya di Kota Manado dalam hal kualitas maupun kuantitas berbeda-beda. Penentuan hirarki di Kota Manado akan membuat Kota Manado menjadi kota yang pembangunannya menjadi lebih terstruktur.	Penelitian ini bertujuan menentukan hirarki wilayah Kota Manado dengan terlebih dahulu mengidentifikasi jumlah fasilitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Manado	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dgn metode analisis Skalogram. Metode analisis Skalogram dipakai untuk menentukan Orde berdasarkan prasarana yang ada dimasing-masing kecamatan yang ada di Kota Manado.	Sebaran fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan di Kora Manado, Hirarkinya terbagi menjadi 4 yaitu Orde 1 yang merupakan pusatnya dan memiliki Fasilitas yang cukup lengkap dibanding dengan orde 2,3 dan 4
Puji Hartati (2016)	Hierarki pusat pelayanan di	Pertambahan jumlah penduduk	Penelitian bertujuan untuk	Analisis yang digunakan adalah	Di Kecamatan Ungaran Timur,

PENULIS	JUDUL	PERMASALAHAN	TUJUAN	METODE	HASIL
	kecamatan ungaran barat dan ungaran timur kabupaten semarang	seharusnya diikuti dengan penambahan fasilitas pendukung, karena ketersediaan fasilitas menentukan tingkat perkembangan wilayah. Hierarki pusat pelayanan penting dan relevan untuk dikaji dan menjadi focus dalam penelitian.	mengidentifikasi hierarki pusat pelayanan di 2 kecamatan	statistik diskriptif dan interpretatif. Metode indeksing digunakan dengan pertimbangan, dapat dipakai untuk menentukan hirarki pusat pengembangan dan sarana pembangunan serta beberapa fasilitas pelayanan di setiap desa.	semua desa/kelurahan masuk dalam hierarki tiga, sedangkan di Kecamatan Ungaran Barat, terdapat dua kelurahan masuk dalam hierarki dua. Kecamatan Ungaran Barat adalah wilayah memilik jumlah penduduk paling banyak, dan kepadatan paling tinggi. Kelurahan Bandarjo menjadi

PENULIS	JUDUL	PERMASALAHAN	TUJUAN	METODE	HASIL
					pusat pelayanan kegiatan penduduk.
Aprilia Riszi Indah Dewi Shara (2018)	Analisis Konektivitas Wilayah di Kota Denpasar	Analisis konektivitas merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perencanaan atau pembangunan wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang dengan baik apabila sistem konektivitas wilayahnya juga baik.	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hirarki wilayah, pusat-pusat pelayanan, dan interaksi antar wilayah pada masing-masing kecamatan di Kota Denpasar.	Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis indeks sentralitas, model gravitasi, dan konig-shimbel	Dari hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indeks sentralitas dan model gravitasi, Kecamatan Denpasar Barat memiliki nilai tertinggi dibanding tiga kecamatan lain di Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Denpasar Barat merupakan wilayah dengan hirarki I (pusat pertumbuhan) Kota Denpasar.

PENULIS	JUDUL	PERMASALAHAN	TUJUAN	METODE	HASIL
					<p>Penentuan pusat-hinterland Kota Denpasar didasari pada faktor ketersediaan sarana-prasarana di masing-masing kecamatan.</p>
<p>Nadia Maulida Fatmawati (2018)</p>	<p>Analisis Pertumbuhan Pusat Fasilitas Pelayanan Wilayah di Kabupaten Klaten Tahun 2005-2015.</p>	<p>Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang letaknya strategis karena menjadi jalur penghubung antara yogyakarta dan surakarta, namun pertumbuhannya paling lambat</p>	<p>1) Menganalisis pertumbuhan pusat pelayanan fasilitas umum di Kabupaten Klaten tahun 2005-2015 2) Menganalisis pola persebaran pelayanan fasilitas umum di</p>	<p>1) Metode indeks sentralitas 2) Metode analisis gravitasi</p>	<p>1) Perhitungan pembobotan dengan menggunakan indeks sentralitas marshall 2) Pertumbuhan jumlah fasilitas umum per kecamatan di Kab.Klaten tahun 2005 dan 2015 3) Perhitungan kekuatan interaksi wilayah menggunakan model gravitasi newton</p>

PENULIS	JUDUL	PERMASALAHAN	TUJUAN	METODE	HASIL
		diantara dua kota tersebut.	Kabupaten Klaten tahun 2005-2015 3)Menganalisis kekuatan interaksi wilayah di Kabupaten Klaten tahun 2005 dan 2015		
Rona Muliana, Puji Astuti, Akmal Fadli (2018)	Kajian pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten kampar	Pusat-pusat pelayanan merupakan suatu aglomerasi dari berbagai kegiatan atau aktivitas serta aglomerasi dari berbagai prasarana dan sarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan	(1) mengidentifikasi struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar berdasarkan RTRW Kabupaten Kampar; (2) mengidentifikasi	Menggunakan Metode deduktif kuantitatif dengan menggunakan analisis skalogram dan indeks sentralitas	Hasil penelitian menunjukkan Dari draft RTRW Kabupaten Kampar dengan hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas terdapat perbedaan struktur pusat-pusat pelayanan.

PENULIS	JUDUL	PERMASALAHAN	TUJUAN	METODE	HASIL
		<p>perkembangan wilayah. Pembangunan pusat-pusat pelayanan selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga diharapkan mampu mendukung pengembangan wilayah.</p>	<p>struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas; (3) menyusun rekomendasi struktur pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Kampar.</p>		
<p>Lalu Renaldo Patrik, Wieske Ch. Rotinsulu, Sherly G, Jocom (2021)</p>	<p>ANALISIS HIRARKI PUSAT PELAYANAN PERKOTAAN DI KOTA BITUNG</p>	<p>(1) Bagaimana Kondisi Ketersediaan Dan Kesesuaian Standarisasi Pelayanan Fasilitas Perkotaan Di Kota Bitung.</p>	<p>(1) mengidentifikasi ketersediaan dan kesesuaian standarisasi pelayanan fasilitas pemerintahan, sosial dan ekonomi di Kota Bitung</p>	<p>(1) Analisis skalogram (2) Indeks sentralitas (3) Analisis gravitasi</p>	<p>(1) Tabel hirarki wilayah (2) Hasil analisis interaksi (3) Perbandingan antara pusat</p>

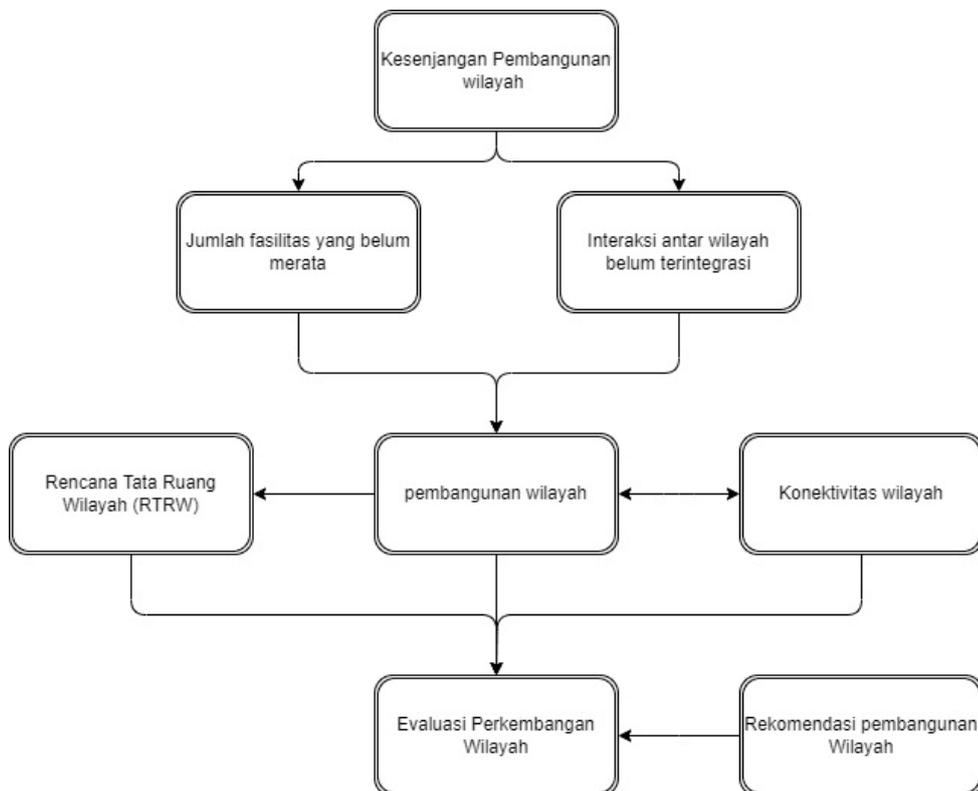
PENULIS	JUDUL	PERMASALAHAN	TUJUAN	METODE	HASIL
		(2) Bagaimana Hirarki Pusat Pelayanan Di Kota Bitung. (3) Bagaimana Kesesuaian Pusat Pelayanan Dalam RTRW Kota Bitung Tahun 2013 – 2033 Terhadap Hasil Penelitian.	(2) menganalisis hirarki pusat pelayanan di Kota Bitung (3) menganalisis kesesuaian pusat pelayanan dalam RTRW Kota Bitung tahun 2013-2033 terhadap kondisi eksisting		pelayanan dalam RTRW dengan hasil analisis
Johan P. Larsson, Özge Önera, and Franziska Sielkera, (2021)	<i>Regional hierarchies of discontent: an accessibility approach</i>	<i>dissatisfaction in the regional hierarchy in spatial continuum, whereas the previous literature mainly used dichotomous division, such as</i>	<i>analyze the distribution of cities electoral support for the Swedish Democrats</i>	<i>-linear Ordinary Least Squares (OLS) model -The accessibility variables that we employ are based on wage sums. The decision to base</i>	<i>- map of changes in their vote share between 2014 and 2018 Elections in all Swedish cities. -Accessibility to wage sums across</i>

PENULIS	JUDUL	PERMASALAHAN	TUJUAN	METODE	HASIL
		<i>core-periphery or North-South Sweden.</i>		<i>the analysis on wage sums, rather than employment numbers, is in part based on recent criticism of employment numbers as proxies for economic activity.</i>	<i>Swedish municipalities: within municipalities, within regions and between regions -Descriptive Statistic</i>
Ocsya Dwi Arum Firmansyah	Analisis Tingkat Hierarki Wilayah di Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2022	Ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Boyolali berdasarkan kelengkapan fasilitas pelayanan publik	(1) Menganalisis tingkat hierarki wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2012-2022 (2) Menganalisis tingkat konektivitas di Kabupaten Boyolali tahun 2012-2022	Menggunakan metode analisis skalogram dan analisis gravitasi	Tabel dan Peta tingkat hierarki wilayah dan konektivitas wilayah di Kabupaten Boyolali tahun 2012-2022

Sumber : Penulis, 2023.

1.6 Kerangka Penelitian

Penelitian mengenai analisis tingkat hierarki wilayah ini memiliki kerangka penelitian yang awal masalah adalah jumlah fasilitas pelayanan publik yang belum merata sehingga aksesibilitasnya kurang memadai menyebabkan terhambatnya pembangunan pada suatu wilayah. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga tidak dijalankan dengan tepat. Untuk itu, dilakukan perhitungan tingkatan hirarki wilayah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari suatu wilayah dan bagaimana konektivitasnya dengan wilayah lain. Sehingga, menghasilkan evaluasi terhadap pembangunan wilayah serta rekomendasi pembangunan wilayah berdasarkan evaluasi perkembangan wilayah tersebut. Berikut adalah kerangka penelitian yang akan dilakukan:



Gambar 1.1 Diagram Kerangka Penelitian

Sumber: Penulis 2023

1.7 Batasan Operasional

- 1) Tempat penelitian berada di Kabupaten Boyolali
- 2) Waktu penelitian yaitu tahun 2012-2023
- 3) Fasilitas yang digunakan yaitu fasilitas sosial (Peribadatan, Pendidikan, Kesehatan), Fasilitas Ekonomi (Pasar), dan Fasilitas Pemerintahan (Kantor Kecamatan dan Kabupaten)